

Peran Advokasi FORLIKA sebagai Mediator Jaringan Multi-stakeholder dalam Implementasi SDGs 8, 14, dan 17 di Sigending, Teluk Sulaiman

Mega Krisnawati*, Khoirul Amin, Mohammad Dziqie Aulia Al Farauqi

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

2211102434079@umkt.ac.id

Abstrak

Kawasan wisata Sigending Teluk Sulaiman menghadapi paradoks pembangunan. Pertumbuhan pariwisata mempercepat degradasi ekosistem laut dan belum memberi manfaat optimal bagi masyarakat lokal akibat lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Pengabdian ini bertujuan menganalisis peran advokasi Forlika sebagai mediator jaringan multi pemangku kepentingan dalam mendukung implementasi SDGs 8, 14, dan 17 di kawasan ekowisata Sigending Teluk Sulaiman. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Hasil observasi menunjukkan bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan masih bersifat terbatas dan transaksional. Forlika berperan sebagai mediator melalui strategi advokasi enabling, networking, framing, dan representasi kepentingan komunitas. Enabling dilakukan melalui fasilitasi penerapan SK Bupati yang memberi legal standing pengelolaan kawasan lindung seluas 1.461,85 ha. Networking diwujudkan melalui kolaborasi vertikal dan horizontal dengan pemerintah serta lembaga donor. Framing dilakukan dengan menerjemahkan isu konservasi ke dalam pendekatan ekonomi berbasis realitas lokal. Representasi diwujudkan dengan memperjuangkan kepentingan komunitas pesisir. Intervensi konkret meliputi penanaman 250.000 pohon mangrove, pemberdayaan ekonomi produktif bagi 75 persen kelompok perempuan, pelatihan keterampilan pariwisata, dan pembentukan patroli kawasan berbasis masyarakat. Forlika berkontribusi pada penguatan ekonomi lokal melalui diversifikasi mata pencaharian, konservasi ekosistem pesisir melalui penetapan zona lindung dan rehabilitasi mangrove, serta penguatan kemitraan multi pemangku kepentingan. Namun, keberlanjutan model ini terhambat oleh ketiadaan forum koordinasi yang terlembaga, ketergantungan pada pendanaan eksternal, dan keterbatasan data kuantitatif. Menegaskan perlunya penguatan koordinasi, diversifikasi pendanaan, sistem pemantauan berbasis data, dan manajemen daya dukung kawasan.

Kata Kunci: Advokasi, Ekowisata Berbasis Komunitas, SDGs, Stakeholder, Forlika, Sigending

DOI:

<https://doi.org/10.47134/comdev.v6i2.1864>

*Correspondensi: Mega Krisnawati

Email: 2211102434079@umkt.ac.id

Received: 30-10-2025

Accepted: 30-11-2025

Published: 30-12-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract

The Sigending Teluk Sulaiman tourism area faces a development paradox. Tourism growth has accelerated marine ecosystem degradation and has not yet delivered optimal benefits to local communities due to weak coordination among stakeholders. This service aims to analyze the role of Forlika's advocacy as a multi-stakeholder network mediator in supporting the implementation of SDGs 8, 14, and 17 in the Sigending Teluk Sulaiman ecotourism area. The research uses a descriptive qualitative approach with a case study method. Data was collected thru in-depth interviews, participant observation, and document analysis. The observation results indicate that collaboration among stakeholders is still limited and transactional. Forlika acts as a mediator through advocacy strategies of enabling, networking, framing, and community representation. Enabling is carried out by facilitating the implementation of a Regent Decree that provides legal standing for the management of a 1,461.85 ha protected area. Networking is realized through vertical and horizontal collaboration with government institutions and donor organizations. Framing is conducted by translating conservation issues into an economic approach grounded in local realities. Representation is manifested through advocacy for the interests of coastal communities. Concrete interventions include the planting of 250,000 mangrove trees, productive economic empowerment for 75 percent of women's groups, tourism skills training, and the establishment of community based area patrol systems. Forlika contributes to local economic strengthening through livelihood diversification, coastal ecosystem conservation through protected zone designation and mangrove rehabilitation, and the development of multi stakeholder partnerships. However, the sustainability of this model is constrained by the absence of an institutionalized coordination forum, dependence on external funding, and limited quantitative data. The study highlights the need to strengthen coordination mechanisms, diversify funding sources, develop data based monitoring systems, and implement carrying capacity management.

Keywords: Advocacy, Community Based Ecotourism, SDGs, Stakeholders, Forlika, Sigending

I. PENDAHULUAN

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2015 sebagai agenda global pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030 (United Nations 2015). Indonesia menghadapi tantangan krusial menerapkan agenda ini ke tingkat lokal, terutama di daerah pesisir dan kepulauan dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis berbeda. Keberhasilan pelaksanaan SDGs sangat bergantung pada organisasi masyarakat sipil sebagai penghubung realitas lokal dan agenda global (Patel 2020). Organisasi berbasis komunitas melakukan fungsi strategis dalam menerjemahkan target SDG menjadi program konkret yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan lokal, sekaligus mengadvokasi kepentingan masyarakat kepada pemerintah dan lembaga eksternal (Reed 2015). Kawasan Sigending-Teluk Sulaiman yang merupakan wilayah paling ujung timur dan selatan Kabupaten Berau, tetapi menghadapi banyak masalah yang berkaitan dengan tiga pilar SDG yang saling terkait, yaitu SDG 8 (Decent Work and Economic Growth), SDG 14 (Life Below Water), dan SDG 17 (Partnerships For The Goals).

Mitra utama pengabdian ini adalah Kampung Teluk Sulaiman di Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, dengan mayoritas masyarakat sebagai nelayan dan petani tradisional, serta Forum Peduli Kelestarian Alam (Forlika) yang didirikan tahun 2015 melibatkan 70-75% pemuda lokal dan kelompok perempuan. Kawasan ini menghadapi tiga masalah saling terkait: pertama, masyarakat bergantung pada perikanan tradisional dengan pendapatan tidak stabil sementara potensi wisata belum optimal karena keterbatasan keterampilan, modal, dan sistem pembagian manfaat tidak adil; kedua, dari aspek lingkungan, aktivitas wisata menyebabkan degradasi ekosistem seperti penangkapan ikan tidak ramah lingkungan, kerusakan terumbu karang akibat snorkeling dan diving tidak terkontrol, serta penumpukan sampah plastik; ketiga, tidak ada forum koordinasi rutin antar stakeholder sehingga program berjalan parsial. Pengabdian ini penting karena Forlika dan Pokdarwis memerlukan dukungan manajerial, model konservasi partisipatif, dan optimalisasi SK Bupati Berau Nomor 474 Tahun 2016, terutama dengan sisa enam tahun mencapai target SDGs 2030. Tinjauan terdahulu menunjukkan kesenjangan pemahaman tentang bagaimana model advokasi organisasi lokal dapat menjawab tantangan SDG 8, 14, dan 17 secara holistik, khususnya dinamika relasi kekuasaan, negosiasi kepentingan, dan mekanisme kolaborasi yang membentuk model pemberdayaan berkelanjutan.

Tinjauan penelitian terdahulu menjelaskan bahwa kajian tentang pelaksanaan CBT, ekowisata berkelanjutan, dan peran stakeholder cenderung mengkaji aspek-aspek ini secara terpisah atau fokus pada satu atau dua dimensi dari SDGs. Selain itu, masih terdapat kesenjangan pemahaman mendalam tentang bagaimana model advokasi Forlika dapat menjawab tantangan ekonomi pariwisata inklusif (SDG 8), konservasi ekosistem laut (SDG 14), dan penguatan kemitraan multi-stakeholder (SDG 17) dalam satu kerangka holistik di kawasan wisata berbasis komunitas. Khususnya, tidak banyak penelitian yang mempelajari bagaimana dinamika relasi kekuasaan, negosiasi kepentingan, dan mekanisme kolaborasi antar-stakeholder di tingkat lokal membentuk dan mengimplementasikan model pemberdayaan yang menyeimbangkan kepentingan ekonomi, konservasi lingkungan, dan partisipasi masyarakat. Penelitian

sebelumnya lebih banyak mengidentifikasi masalah dan dampak, tetapi belum secara holistik mengungkap bagaimana proses pemberdayaan berlangsung.

Studi sebelumnya menjelaskan bahwa Community-Based Tourism (CBT) memiliki potensi dalam membantu mencapai SDGs melalui pemberdayaan masyarakat lokal, menghasilkan peningkatan ekonomi, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, dan pelestarian budaya lokal, namun terdapat ketergantungan pada faktor eksternal yang menimbulkan risiko fluktuasi dampak SDGs (Hariyadi et al. 2024). Pentingnya melibatkan kerja sama multi-stakeholder antara pemerintah daerah, swasta, dan komunitas yang lebih terorganisir telah ditekankan (Jamal 1995), sejalan dengan strategi CHSE yang berkontribusi pada pemulihan pariwisata berkelanjutan dengan menekankan partisipasi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (Yamin, Darmawan & Rosyadi 2021). Permasalahan SDG 8 tercermin dari belum optimalnya manfaat ekonomi pariwisata bagi masyarakat lokal, di mana masyarakat pesisir belum sepenuhnya berdaya secara ekonomi dan sosial karena keterbatasan kemampuan dan keterampilan (Azizah et al. 2023), sementara peran Kelompok Sadar Wisata menjadi penting dalam memberdayakan masyarakat melalui tiga aspek yaitu menciptakan kondisi pendukung, memberikan kekuatan dan kepercayaan diri, serta melindungi masyarakat dari kompetisi tidak sehat (Scheyvens 2002). Pengembangan pariwisata juga menimbulkan tekanan terhadap SDG 14 melalui degradasi ekosistem pesisir dan laut, sementara pengelolaan berbasis komunitas dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dengan baik dalam menjaga kelestarian ekosistem laut dan perikanan (Tampubolon & Wulandari 2021). Kompleksitas integrasi membutuhkan kolaborasi multi-stakeholder sebagaimana diamanatkan SDG 17, namun koordinasi masih menghadapi kendala seperti fragmentasi peran, keterbatasan keterlibatan sektor swasta, dan minimnya keterlibatan akademisi, di mana tinjauan sistematis menemukan banyak masalah termasuk infrastruktur tidak memadai, kolaborasi buruk, dan kurangnya pengetahuan tentang praktik berkelanjutan (Salman et al. 2024).

Tinjauan terdahulu menunjukkan kesenjangan pemahaman tentang bagaimana model advokasi organisasi lokal dapat menjawab ketiga tantangan SDGs tersebut dalam satu kerangka holistik. Pengabdian ini menggunakan teori stakeholder (Freeman 1984; Mitchell, Agle & Wood 1997), konsep advokasi organisasi lokal meliputi enabling, networking, framing, dan representasi (Keck 1998), serta kerangka SDGs untuk mengevaluasi kontribusi terhadap target pembangunan berkelanjutan. Metode pendekatan meliputi pendampingan intensif melalui survey lapangan kolaboratif, workshop koordinasi multi-stakeholder, pelatihan pengelolaan ekowisata, dan penerapan teknologi drone untuk dokumentasi visual promosi destinasi serta monitoring lingkungan. Tujuan pengabdian adalah menganalisis peran advokasi Forlika sebagai mediator jaringan stakeholder untuk mendukung implementasi SDGs 8, 14, dan 17 di kawasan ekowisata Sigending-Teluk Sulaiman, dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi inklusif, integrasi konservasi ekosistem laut dengan pengembangan pariwisata, serta penguatan kemitraan multi-stakeholder yang berkelanjutan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus kualitatif deskriptif. Kawasan wisata Sigending, Kampung Teluk Sulaiman, dipilih karena menghadapi masalah menantang terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat, kerusakan ekosistem laut, dan koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan SDG 8, 14, dan 17. Penelitian dilaksanakan selama 2 hari dari 22 Juli dan 13 Agustus 2025, meliputi tahap survey lokasi, pertemuan dengan pihak Pokdarwis, Forlika, Pemuda yang terlibat, analisis, dan penyusunan rekomendasi. Informan penelitian dipilih secara purposive dari empat kelompok pemangku kepentingan: pemerintah daerah, Forlika, masyarakat lokal. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam pada 4 November 2025, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap kebijakan (SK Bupati 474/2016) serta laporan program konservasi.

Forum Peduli Kelestarian Alam (Forlika), mitra utama dalam penelitian ini, berperan sebagai pengelola kawasan ekowisata dan mediator bagi berbagai stakeholder; Pokdarwis Sigending, kelompok sadar wisata yang mengelola aktivitas pariwisata berbasis masyarakat; dan masyarakat Kampung Teluk Sulaiman, yang terdiri dari nelayan, petani, kelompok perempuan, dan pemuda, adalah penerima manfaat langsung dari program pemberdayaan. Selain itu, kerja sama ini memiliki dukungan dari pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Berau dan BAPEDA, serta lembaga donor seperti YKAN (Yayasan Konservasi Alam Nusantara) dan BRGM (Badan Restorasi Gambut dan Mangrove), yang memberikan dana dan bantuan teknis.

Penelitian dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, persiapan dengan menyusun instrumen pertanyaan seputar Sigending dan rencana dokumentasi untuk promosi ekowisata. Tahap kedua adalah survey lapangan yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli dan 13 Agustus 2025, meliputi pertemuan dengan Pokdarwis, Forlika, dan pemuda yang terlibat dalam pengelolaan kawasan. Selama survey, Forlika memberikan pemahaman dan edukasi di setiap lokasi yang ditelusuri tim peneliti di kawasan Sigending, serta dilakukan dokumentasi visual menggunakan drone untuk mendukung promosi destinasi dan monitoring lingkungan. Pada tahap ketiga, dokumen kebijakan pemerintah (SK Bupati 474/2016), laporan program konservasi dari pihak terkait, dan wawancara mendalam secara online dengan informan penting, termasuk pendiri dan ketua Forlika, dikumpulkan. Selanjutnya, data dianalisis dan dibuat rekomendasi.

Pembagian peran dalam penelitian dirancang secara kolaboratif. Tim pengabdian berperan menyiapkan instrumen pertanyaan seputar Sigending, melaksanakan dokumentasi visual untuk promosi ekowisata, serta memfasilitasi pertemuan dengan Pokdarwis, Forlika, dan pemuda yang terlibat dalam survey lapangan. Forlika berperan sebagai koordinator dan edukator lapangan yang memberikan pemahaman di setiap lokasi yang ditelusuri di kawasan Sigending, menyediakan akses ke wilayah konservasi, serta menjadi narasumber utama dalam wawancara mendalam. Pokdarwis dan pemuda lokal berperan sebagai pelaksana kegiatan yang mendampingi tim selama survey lapangan dan memberikan informasi praktis tentang operasional ekowisata. Pemerintah daerah berperan memberikan dukungan pendanaan untuk survey lokasi dan dokumentasi, serta menyediakan dokumen kebijakan yang mendukung analisis data.

Data dianalisis menggunakan tiga pendekatan. Pertama, menganalisis bentuk-bentuk advokasi Forlika, perannya sebagai mediator dalam jaringan multi-stakeholder, serta kontribusinya terhadap capaian SDGs 8, 14, dan 17. Kedua, pemetaan peran stakeholder menggunakan teori Freeman (1984) dan Mitchell (1997). Ketiga, analisis kontribusi SDGs berdasarkan framework IAEG-SDGs (2017) untuk menilai pencapaian target 8.5, 8.9, 14.2, 14.5, 14.7, dan 17.17. Beberapa capaian dan output penelitian digunakan untuk menentukan keberhasilan penelitian. Capaian proses meliputi identifikasi pola kemitraan multi-stakeholder, pelaksanaan pertemuan multi-stakeholder, dan dokumentasi praktik advokasi Forlika melalui wawancara dan dokumentasi visual kawasan. Output meliputi identifikasi pola kemitraan multi-stakeholder, teridentifikasinya strategi advokasi Forlika (memungkinkan, networking, framing, dan representasi), dan analisis kontes. Sebagai indikator dampak, diharapkan Forlika dan Pokdarwis akan diperkuat, masyarakat akan lebih menyadari konservasi, dan model akan digunakan di wilayah pesisir lain.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Advokasi Forlika dalam Pola Kemitraan Multi-Stakeholder di Kawasan Sigending

Analisis pola kemitraan di kawasan Sigending-Teluk Sulaiman menggunakan kerangka teori stakeholder Freeman (1984) yang menyatakan bahwa “organisasi memiliki hubungan dengan banyak stakeholder dan dapat melahirkan serta memelihara dukungan dari berbagai kelompok dengan mempertimbangkan dan menyeimbangkan kepentingan mereka yang relevan.” (Freeman 1984) Dalam konteks ekowisata berbasis komunitas, efektivitas kemitraan multi-stakeholder menjadi kunci keberhasilan implementasi pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan aspek ekonomi, ekologi, dan sosial (Mitchell et al. 1997)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan ekowisata di wilayah Sigending-Teluk Sulaiman melibatkan banyak jaringan kemitraan yang menghubungkan berbagai tingkatan stakeholder. Menurut pendiri Forlika (Mahmud Kiai), awal kolaborasi dimulai dari peran intermediasi lembaga non-pemerintah:

“yang menjembatani ini awalnya mereka, NGO YKAN dan bersama Pokdarwis.” (Mahmud Kiai, wawancara pribadi, 4 November 2025)

Ketua Forlika, Vera Rosita Ekayanti menambahkan peran YKAN:

“sejak awal kami telah terikat dengan TFCI, sehingga dikenal sebagai NGO lain. Dan itu awalnya dari YKAN yang sebelumnya bernama TNC” (Vera Rosita Ekayanti, wawancara pribadi, 4 November 2025)

Analisis dokumen kajian mengidentifikasi empat kategori utama stakeholder yang berkontribusi pada pengembangan ekowisata Sigending (Ferdianto 2024). Pertama, lembaga internasional seperti TNC (The Nature Conservancy) yang sekarang bernama YKAN (Yayasan Konservasi Alam Nusantara), dan TFCI (Program Konservasi Hutan Tropis). Kedua, ada pemerintah kampung, pemerintah kabupaten melalui Dinas Pariwisata, BRGM (Badan Restorasi Gambut dan Mangrove) dan BAPEDA. Ketiga, ada organisasi lokal, yaitu Forlika (Forum Peduli Kelestarian Alam). Keempat, komunitas lokal yang terdiri dari nelayan, petani, pengrajin, dan kelompok perempuan. Dengan SK Bupati Berau Nomor 474 tahun 2016 tentang Penetapan Kawasan Lindung dan Ekowisata Mangrove Sigending yang memberikan landasan hukum bagi pengelolaan

kawasan seluas 1.500 hektar (Pemerintah Kabupaten Berau 2016). Hal ini memperkuat posisi Forlika sebagai pengelola wilayah, Vera selaku ketua Forlika menjelaskan, jika sudah ada legal standing atau landasan hukum kita dalam arti untuk memberikan larangan penebangan dan pembukaan lahan atau perusakan di sini, akan lebih mempermudah kita sebagai lembaga masyarakat untuk bekerja menjaga ini.

Pernyataan ini mengonfirmasi argumen (Tosun 2000) bahwa meningkatkan peran organisasi lokal dalam pengelolaan pariwisata memerlukan tidak hanya capacity building tetapi juga legal empowerment yang memberikan otoritas formal. SK bupati ini juga mencerminkan implementasi target SDG 17.17 tentang “mendorong dan mempromosikan kemitraan publik, publik-swasta dan masyarakat sipil yang efektif” melalui formalisasi peran masing-masing aktor dalam tatakelola ekowisata. (Inter-Agency and Expert Group on SDG Indicators 2017) Namun, disisi lain pola kemitraan yang terbentuk masih memiliki keterbatasan dalam hal koordinasi strategis, ketua Forlika menyatakan:

“kami tidak ada kewajiban untuk menyetor laporan itu kepada YKAN kecuali ketika ada lembaga atau siapapun yang kemudian menjadi donatur ke kita, kewajiban kami untuk menyampaikan laporan pertanggungjawab, kalau informasi lebih umum kami lebih banyak ke media sosial” .” (Vera Rosita Ekayanti, wawancara pribadi, 4 November 2025)

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa hubungan antar stakeholder lebih bersifat transaksional dan berbasis proyek, bukan kemitraan strategis jangka panjang yang terintegrasi. Kondisi ini bertentangan mengenai “strategic management approach” yang menekankan betapa pentingnya hubungan yang saling menguntungkan secara jangka panjang antara organisasi dan stakeholder (Mitchell et al. 1997). Selain itu, perspektif stakeholder salience, digunakan untuk menganalisis hasil mengenai sifat kemitraan yang transaksional serta keterbatasan koordinasi strategis. Menurut teori ini, tiga sifat stakeholder menentukan jumlah perhatian yang diberikan kepada mereka: power, legitimacy, urgency (Mitchell et al. 1997). Pemerintah daerah (yang memiliki otoritas untuk menetapkan SK Bupati) dan YKAN (yang bertanggung jawab atas pendanaan dan pengetahuan teknis) memiliki kekuatan dan otoritas yang sangat tinggi dalam konteks Sigending.

Kondisi ini menunjukkan bahwa Forlika belum sepenuhnya berfungsi sebagai mediator yang menghubungkan kepentingan stakeholder dalam kerangka governance yang terintegrasi. Forlika telah mengambil tindakan yang bijaksana dengan memanfaatkan media sosial untuk memberikan transparansi kepada publik dan mengadakan pertemuan rutin untuk berhubungan langsung dengan komunitas lokal. Namun, belum terbentuk mekanisme koordinasi reguler dengan pemerintah daerah dan YKAN untuk perencanaan jangka panjang, monitoring bersama, atau penyesuaian program yang mengurangi ketergantungan pada pendanaan berbasis proyek. Ketiadaan forum multi-stakeholder yang terlembaga membatasi kapasitas Forlika untuk mengkonsolidasikan kepentingan berbagai pihak menjadi strategi pengembangan ekowisata yang berkelanjutan

Tabel 1. Matriks Stakeholder dan Perannya dalam Pengembangan Ekowisata Sigending

| Kategori Stakeholder | Nama Lembaga/Organisasi | Peran Utama | Kontribusi Spesifik |
|-----------------------|---|---------------------|--|
| Lembaga Internasional | YKAN (ex-TNC), TFCI | Fasilitator & Donor | Pendanaan konservasi, capacity building, mediasi dengan pemerintah |
| Pemerintah Pusat | BRGM | Implementor Program | Pendanaan Penanaman 250.000 pohon mangrove (2019-2020) |
| Pemerintah Daerah | Pemkab Berau (Dinas Pariwisata, BAPEDA) | Regulator & Advokat | Penetapan SK Bupati |
| Organisasi Lokal | Forlika | Operator & Advokat | Pengelolaan kawasan, patroli, koordinasi masyarakat |
| Masyarakat Lokal | Nelayan, Petani, kelompok Perempuan, Pemuda | Pelaku Utama | Penyedia jasa wisata, pemandu, konservasi, UMKM |

Sumber: Analisis data penelitian, 2025



Gambar 1. Kegiatan Survey Kolaboratif Tim Peneliti bersama Forlika dan Pokdarwis

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

Dampak Advokasi Forlika terhadap Pencapaian SDG 8

Diversifikasi mata pencaharian lokal telah dihasilkan oleh upaya Forlika dalam mendorong akses masyarakat terhadap program lembaga eksternal. Melalui kolaborasi dengan YKAN dan BRGM, Forlika membuka kesempatan bagi masyarakat, terutama kelompok perempuan, untuk terlibat dalam aktivitas produktif baru. Hasil wawancara dengan menunjukkan bahwa ekowisata mengubah mata pencaharian masyarakat, dengan kelompok perempuan terlibat dalam banyak aktivitas produktif. Ketua Forlika menjelaskan keterlibatan perempuan:

“program kami sempat pembuatan piring dari lidi kemudian penanaman mangrove yang terlibat juga perempuan, bisa di bilang perempuan di Teluk Sulaiman itu sangat aktif untuk kegiatan seperti pemberdayaan” (Vera Rosita Ekayanti, wawancara pribadi, 4 November 2025)

Selain itu, terdapat lima aktivitas ekonomi utama yang melibatkan masyarakat: (1) penyediaan homestay dan penginapan sederhana; (2) penyedia tour lokal; (3) penyewaan perahu ketinting dan peralatan snorkling; (4) pembuatan produk lokal dan makanan; dan (5) partisipasi dalam program konservasi berbayar yang difasilitasi BRGM dan YKAN.

Peningkatan hasil tangkapan nelayan menunjukkan dampak ekonomi dari pelestarian ekosistem mangrove, karena hutan bakau berfungsi sebagai habitat para spesies air dan peluang bagi banyaknya hasil tangkapan ikan. Namun, ketua Pokdarwis mengatakan:

“adanya pariwisata yang meningkat menghasilkan multiplier efek ekonomi yang melibatkan berbagai profesi, termasuk transisi nelayan yang sebelumnya menghadapi kesulitan aktivitas melaut menjadi pengelola jasa wisata dengan peningkatan ekonomi yang lebih signifikan.” (Mahmud Kiai, wawancara pribadi, 4 November 2025)

Selain itu, strategi pelibatan pemuda dalam kegiatan ekonomi masih bersifat spontan tanpa perencanaan spesifik. Keterbatasan akses modal dan sumber daya, kurangnya pendidikan dan keterampilan manajemen usaha, persaingan dengan wisata modern yang memiliki fasilitas memadai, serta ketergantungan ekonomi pada sumber daya alam yang masih tinggi.

Temuan ini menunjukkan implementasi tiga dimensi pemberdayaan (Jim Ife & Tesoriero 2008). (1) advokasi legal formal, yang menciptakan kondisi pendukung (enabling) seperti perlindungan wilayah dan akses ke program pelatihan dari lembaga donor. (2) sejalan dengan target SDG 8.5 tentang kesempatan kerja produktif untuk semua gender, fasilitasi 75% perempuan dalam kegiatan produktif memperkuat kapasitas ekonomi kelompok marginal. (3) peraturan yang mendukung Forlika melindungi dari eksploitasi berlebihan dan tindakan berbahaya. Multiplier effect yang melibatkan UMKM, jasa transportasi, dan kuliner lokal sejalan dengan target 8.9 tentang “pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan produk lokal.” (Ashley 2002)

Namun demikian, pendekatan advokasi Forlika untuk pelibatan pemuda masih bersifat impulsif dan tidak direncanakan secara menyeluruh, tidak mengatasi kendala seperti ketergantungan pada sumber daya alam, akses modal yang terbatas, dan keahlian manajemen usaha. Menurut (Jim Ife & Tesoriero 2008) menekankan bahwa pemberdayaan berkelanjutan memerlukan “pendekatan yang sistematis dan terstruktur dengan strategi dan mekanisasi yang jelas” daripada intervensi ad-hoc yang rentan terhadap ketidakkonsistenan dan bergantung pada upaya individu tertentu. Kemampuan untuk memastikan dampak objektif dari SDG 8 juga terbatas karena kekurangan data kuantitatif.

Strategi Advokasi Forlika dalam Pengelolaan Ekosistem Pesisir Kontribusi terhadap SDG 14

Motivasi awal konservasi berasal dari kesadaran bahwa keanekaragaman hayati flora dan fauna mangrove di wilayah Sigending sangat beragam dan harus dilindungi dari perusakan dan perambahan. Metode konservasi menggabungkan pembelajaran masyarakat dengan tindakan nyata dengan menggunakan bahasa sederhana yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat lokal disana. Hal ini terutama berlaku untuk masyarakat nelayan yang perlu memahami peran mangrove dan masyarakat pesisir yang perlu memahami cara mencegah abrasi pantai dan bencana alam.

Tabel 2. Capaian Konservasi Lingkungan di Kawasan Sigending

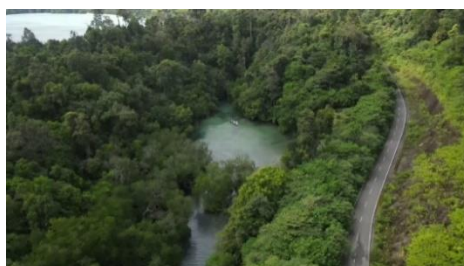
| Aspek Konservasi | Capaian Terukur | Dampak yang Tercatat |
|------------------------|---|--|
| Rehabilitasi Ekosistem | 250.000 pohon mangrove di 25 ha (2019-2020) | Peningkatan tutupan vegetasi pesisir |
| Zona Lindung | 1.461,85 ha (SK Bupati 474/2016) | Perlindungan legal keanekaragaman hayati |
| Patroli Kawasan | Rutin melibatkan masyarakat dan aparat | Pengurangan aktivitas ilegal |
| Hasil Tangkapan | Peningkatan populasi ikan dan udang | Benefit ekonomi bagi nelayan |
| Edukasi Masyarakat | Program penyuluhan berbasis konteks lokal | Peningkatan kesadaran konservasi |

Sumber: Analisis data, 2025



Gambar 2. Kegiatan Survey Lapangan Tim Peneliti di Kawasan Taman Mangrove Sigending

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025



Gambar 3. Foto Udara Kawasan Lindung dan Ekowisata Mangrove Sigending

Sumber: Dokumentasi Drone oleh Arman, 2025



Gambar 4. Keterlibatan Kelompok Perempuan dalam Program Rehabilitasi Mangrove di Kawasan Sigending
Sumber: Dokumentasi YKAN Berau, 2022, Srikandi Pelindung Sigending



Gambar 5. Habitat Penyu di Kawasan Ekowisata Sigending
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025



Gambar 6. Bekantan (*Nasalis larvatus*) di Hutan Mangrove Sigending
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

Mekanisme insentif ekonomi memastikan bahwa lingkungan yang terjaga akan menghasilkan nilai ekonomis melalui peningkatan pariwisata dan hasil tangkapan ikan. Adapun yang menjadi tantangan utama konservasi adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat lokal yang sebelumnya kurang memahami fungsi mangrove dan cenderung hanya melihat nilai ekonomis jangka pendek dari eksplorasi sumber daya. Selain itu, penelitian menunjukkan ketiadaan sistem carrying capacity management yang berpotensi menciptakan tekanan overtourism mengancam keberlanjutan ekosistem (Ferdianto 2024).

Forlika mendukung model ekowisata berbasis komunitas (CBT) karena memungkinkan masyarakat lokal menjadi pemilih dalam konservasi. Melalui model ini, Forlika memungkinkan mekanisme insentif ekonomi yang mencerminkan prinsip pengelolaan melalui penggunaan, dimana masyarakat mendapat manfaat langsung dari pelestarian dan menjadi lebih termotivasi untuk mempertahankan keberlanjutan (Weaver 2006). Berbeda dengan conservation by exclusion yang menciptakan trade-off antara konservasi

dan ekonomi, model Sigending menciptakan complementarity dimana konservasi menghasilkan keuntungan ekonomi yang dapat diukur seperti peningkatan hasil tangkapan ikan.

Peningkatan hasil tangkapan ikan menunjukkan bahwa metode ini menciptakan positive feedback loop antara konservasi dan kesejahteraan ekonomi, sejalan dengan konsep payment for ecosystem services. Prinsip CBT tentang “mekanisme partisipasi yang sesuai secara kultural” yang menghormati sistem pengetahuan lokal (Giampiccoli 2018). Jika edukasi dan penegakan hukum digabungkan menunjukkan pendekatan co-management yang mengintegrasikan kekuatan masyarakat dengan kekuasaan pemerintah.

Untuk mencapai SDG 14, pencapaian konservasi berkontribusi pada target 14.5 untuk konservasi minimal 10% wilayah pesisir (1.461,85 ha) dan target 14.2 tentang pengelolaan ekosistem pesisir berkelanjutan (penanaman 250.000 pohon mangrove). Sejalan dengan target 14.7 tentang manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan,” peningkatan hasil tangkapan menunjukkan manfaat layanan ekologi.

Namun, advokasi Forlika menghadapi beberapa keterbatasan yang signifikan dalam hal teknis pengelolaan. Ketiadaan carrying capacity management menunjukkan gap penting dalam implementasi model CBT yang berkelanjutan, yang seharusnya menyeimbangkan tujuan konservasi dengan pertumbuhan pariwisata melalui mekanisme pencegahan eksploitasi berlebihan (Giampiccoli 2018) menekankan bahwa CBT berkelanjutan memerlukan “imbangan antara tujuan konservasi dan pertumbuhan pariwisata melalui mekanisme yang mencegah eksploitasi berlebihan.” Kemampuan untuk mengukur dampak konservasi secara objektif dan menerapkan manajemen adaptasi yang berbasis bukti terbatas karena kekurangan baseline data ekosistem (*coral cover, fish biomass, mangrove density*).

Advokasi Forlika dalam Membangun Kemitraan Konservasi SDG 17

Forlika didirikan dengan misi “mewujudkan Kampung Teluk Sulaiman yang berkualitas, aman, nyaman, bersih, mandiri, serta alam yang lestari bagi kemakmuran bersama. Dalam praktiknya, Forlika berfungsi sebagai aktor advokasi dan memediasi kepentingan masyarakat lokal dengan lembaga konservasi dan pemerintah, sekaligus menjadi operator lapangan dan fasilitator program. Pihak Forlika menjelaskan:

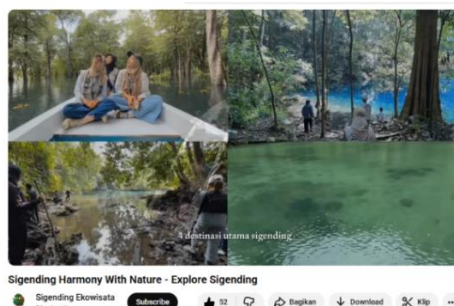
“strategi saya dengan merekrut mereka anak muda, kebanyakan 70-75% yang isinya anak muda pada saat itu sangat berkumpul” (Vera Rosita Ekayanti, wawancara pribadi, 4 November 2025)

Analisis peran Forlika sebagai: (1) motivator yang menggerakkan kesadaran konservasi; (2) Fasilitator yang menjembatani masyarakat dengan stakeholder eksternal; (3) operator yang mengelola patroli, penanaman mangrove, dan aktivitas wisata; (4) advokat yang memperjuangkan penetapan kawasan lindung.

Mengakses program BRGM untuk menanam 250.000 pohon mangrove di 25 hektar, yang mendapat penghargaan dari YKAN atas keberhasilan melindungi kawasan, menunjukkan kapasitas mobilitas sumber daya. Mekanisme kerja YKAN bersifat responsif, meminta informasi tentang keragaman hayati, partisipasi masyarakat, dan kerusakan lingkungan. Meskipun demikian, struktur organisasi tetap informal, dengan ketergantungan besar pada pendanaan eksternal dan individu kunci tertentu.

Peran multi-dimensional ini mencerminkan implementasi target SDG 17.17 tentang “mendorong dan mempromosikan kemitraan publik, publik-swasta, dan masyarakat sipil yang efektif” (Inter-Agency and Expert Group on SDG Indicators 2017). Untuk mendukung konservasi dan pengembangan ekowisata,

advokasi Forlika berhasil membangun kolaborasi vertikal dengan pemerintah kabupaten dan horizontal dengan YKAN, BRGM, dan TFCI. Rekrutmen dominan pemuda membawa dinamika baru, seperti kemampuan untuk menggunakan teknologi digital untuk promosi destinasi, yang membantu organisasi mempertahankan keberlanjutan antar generasi.



Gambar 7. Inovasi Promosi Digital Ekowisata Sigending melalui Platform YouTube
Sumber: Channel Youtube Sigending Ekowisata, dikelola oleh Forlika, 2025

Kontribusi terhadap Implementasi SDGs: Analisis Integratif

Kawasan Sigending menunjukkan pendekatan integratif yang menciptakan Co-benefits untuk setiap SDGs. Untuk SDG 8, diversifikasi ekonomi dan keterlibatan 75% perempuan berkontribusi pada target 8.5 dan 8.9. Pariwisata ditunjukkan sebagai katalisator pertumbuhan inklusif melalui efek multiplier yang melibatkan bisnis kecil dan menengah (UMKM), transportasi, dan makanan lokal. Zona lindung 1.461,85 ha dan penanaman 250.000 pohon berkontribusi pada target 14.2 dan 14.5 untuk SDG 14. Peningkatan hasil tangkapan menunjukkan ecosystem services benefits. Kemitraan multi-level dan multi sektor untuk SDG 17 berkontribusi pada target 17.17 tentang kemitraan publik-swasta-masyarakat yang efektif.

Namun demikian, analisis menemukan gap kritis dalam measurement dan institutional arrangements. Untuk SDG 8, kemampuan untuk memverifikasi dampak dari target 8.1 tentang “sustain per capita economic growth” dibatasi oleh kurangnya data kuantitatif pendapatan dan indikator decent work. Mekanisme pembagian keuntungan yang tidak resmi dapat menyebabkan konflik di dalam organisasi dan menyingkirkan kelompok yang rentan. Untuk SDG 14, tidak mungkin untuk mengukur progres secara objektif karena tidak ada baseline data ekosistem dan monitoring sistematis. (Inter-Agency and Expert Group on SDG Indicators 2017) menekankan bahwa “penerapannya yang efektif dari SDG memerlukan struktur pemantauan yang kuat dengan baseline data dan metrik waktu.”

Menurut (United Nations Development Programme 2020) menyatakan kemitraan SDG yang efektif memerlukan perjanjian yang diformalkan, struktur tata kelola yang jelas, dan mekanisme koordinasi yang dilembagakan, sifat kemitraan yang berbasis proyek menghalangi pencapaian “long-term strategic partnerships” untuk SDG 17. Kemitraan belum mencapai tahap kemitraan yang matang dengan visi bersama, tanggung jawab bersama, dan pengambilan keputusan bersama, karena tidak ada forum reguler multi-stakeholder dan mekanisme akuntabilitas yang hanya terjadi dalam konteks donasi.



Gambar 8. Forum Koordinasi Multi-Stakeholder Ekowisata Sigending
Sumber: Instagram @pokdarwis.sigending, postingan tanggal 10 Juli 2025

Model Advokasi Multi-Stakeholder Forlika untuk Implementasi SDGs 8, 14, 17

Praktik advokasi Forlika dalam pengembangan ekowisata Sigending, menggunakan model advokasi multi-level dengan empat elemen strategis: enabling, networking, framing, dan representasi. Model ini menjelaskan bagaimana organisasi lokal dapat membantu melaksanakan SDGs dengan menggunakan mekanisme advokasi yang menghubungkan realitas lokal dengan agenda global.

Enabling dari model advokasi Forlika adalah upaya sistematis untuk membangun legal standing melalui advokasi regulasi. Forlika berhasil mendukung penerbitan SK Bupati Berau Nomor 474 tahun 2016 tentang Penetapan Kawasan Lindung dan Ekowisata Mangrove Sigending yang memberikan organisasi wewenang resmi untuk mengelola wilayah seluas 1.500 hektar (Pemerintah Kabupaten Berau 2016). Ketua Forlika menjelaskan dampak strategis dari legal standing:

“sudah ada legal standing atau landasan hukum kita dalam arti untuk memberikan larangan penebangan dan pembukaan lahan atau perusakan di sini, akan lebih mempermudah kita sebagai lembaga masyarakat untuk bekerja menjaga ini.” (Vera Rosita Ekayanti, wawancara pribadi, 4 November 2025)

Dengan legal empowerment ini berfungsi sebagai enabling factor yang memungkinkan Forlika: (1) melakukan penegakan dan patroli aturan kawasan lindung, yang berkontribusi pada SDG 14.5 tentang konservasi minimal 10% wilayah pesisir; (2) mendapatkan akses ke program pendanaan dari lembaga donor yang membutuhkan legalitas pengelola formal, yang membuka peluang ekonomi baru (SDG 8); dan (3) memperkuat posisi Forlika sebagai mitra resmi pemerintah dalam forum multi-stakeholder (SDG 17.17).

Elemen kedua berkaitan dengan networking yaitu kemampuan Forlika untuk membangun dan mempertahankan jaringan kerja sama dengan berbagai stakeholder di berbagai level. Forlika berhubungan dengan pemerintah kampung dan pemerintah kabupaten melalui Dinas Pariwisata dan BAPEDA. Secara horizontal, Forlika bekerja sama dengan lembaga konservasi internasional (YKAN, TFCI) dan lembaga pemerintah (BRGM). Kolaborasi dengan BRGM menghasilkan program penanaman 250.000 pohon mangrove, dan kolaborasi dengan YKAN menghasilkan penghargaan untuk perlindungan kawasan yang berhasil.

Strategi networking ini menunjukkan pelaksanaan SDG 17.17 tentang kerja sama yang efektif antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil. Forlika tidak bertindak sebagai penerima program secara langsung, tetapi sebagai knowledge broker yang menyediakan data lapangan (keanekaragaman hayati, partisipasi masyarakat, kerusakan lingkungan) yang dibutuhkan lembaga donor untuk pengambilan

keputusan. Kemampuan untuk memobilisasi sumber daya eksternal ini menghasilkan efek multiplier ekonomi yang melibatkan UMKM, jasa transportasi, dan kuliner lokal. Hal ini berkontribusi pada SDG 8.9 tentang pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja.

Elemen ketiga adalah Framing yang menterjemahkan isu konservasi sebagai isu ekonomi. Forlika menggunakan komunikasi berbasis bukti lokal dan menghindari jargon teknis.

“kami tidak menggunakan istilah teknis seperti “ekosistem” atau “biodiversitas.” Kami memberi tahu nelayan, jika bakau hilang, ikan juga hilang, tangkapan akan berkurang.” (Vera Rosita Ekayanti, wawancara pribadi pada 4 November 2025)

Dalam pendekatan ini, konservasi mangrove (SDG 14.2) dan peningkatan hasil tangkapan nelayan (SDG 8) dihubungkan. Dengan menggunakan framing yang berbeda dengan lembaga donor, mengemas data lokal ke dalam proposal terukur yang selaras dengan indikator SDGs. Kemudian, elemen representasi yang mewakili kepentingan komunitas dalam dialog dengan pemerintah kabupaten, negosiasi dengan lembaga donor, dan mediasi konflik kepentingan. Forlika memfasilitasi dialog yang menghasilkan kompromi silvovishery, yang memungkinkan bisnis berjalan tanpa merusak ekosistem. keterlibatan 75% perempuan dalam program produktif menunjukkan representasi kelompok marginal. Hal ini sejalan dengan SDG 8.5 tentang kesempatan kerja untuk semua gender dan SDG 17.17 tentang kemitraan yang mencerminkan aspirasi lokal.

Keempat elemen membentuk sinergi: legal standing memperkuat posisi tawar dalam kemitraan, kemampuan framing memudahkan komunikasi dengan berbagai stakeholder, dan fungsi representasi memastikan bahwa program memenuhi kebutuhan lokal. Tetapi keberlanjutan dibatasi oleh ketergantungan dibatasi oleh ketergantungan pada individu penting dan struktur organisasi informal. Sebuah transisi menuju kemandirian finansial diperlukan untuk keberlanjutan organisasi komunitas (Jim Ife & Tesoriero 2008). Meskipun model advokasi Forlika berhasil dalam jangka pendek, pelembagaan struktur dan diversifikasi pendanaan harus dilakukan untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang.

IV. KESIMPULAN

Melalui strategi advokasi enabling, networking, framing, dan representasi, Forlika berperan sebagai mediator jaringan multi-stakeholder yang penting dalam mendukung pelaksanaan SDGs 8, 14, dan 17 di kawasan ekowisata Sigending-Teluk Sulaiman. Forlika bekerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga internasional seperti YKAN dan BRGM, serta masyarakat lokal, tetapi karena tidak ada forum koordinasi dan mekanisme akuntabilitas yang jelas, kerja sama masih bersifat transaksional dan berbasis proyek. Dalam kaitannya dengan SDG 8, Forlika mendorong diversifikasi ekonomi dengan melibatkan 75% perempuan dalam aktivitas produktif dan menciptakan efek multiplier melalui UMKM dan jasa pariwisata. Namun, karena kurangnya data kuantitatif dan metode pelibatan pemuda yang masih spontan, dampak ekonomi belum terukur secara menyeluruh. Untuk SDG 14, Forlika berhasil mengadvokasi penetapan kawasan lindung seluas 1.461,85 ha dan rehabilitasi 250.000 pohon mangrove, yang berkontribusi pada pelestarian ekosistem pesisir dan peningkatan hasil tangkapan ikan, tetapi keberlanjutan konservasi terancam oleh belum diterapkannya sistem manajemen kapasitas mengangkut dan kurangnya data dasar ekosistem. Sementara untuk SDG 17, Forlika menunjukkan kapasitas sebagai fasilitator kemitraan multi-level, tetapi kelembagaannya masih bergantung pada pendanaan eksternal dan kepemimpinan individu dengan struktur organisasi yang belum terdiversifikasi dan terlembagakan secara resmi. Diperlukan peningkatan tata kelola

kolaboratif melalui formalisasi kemitraan, pembuatan sistem pemantauan partisipatif, diversifikasi sumber pendanaan, dan penerapan manajemen daya dukung kawasan wisata. Penelitian ini menunjukkan bahwa organisasi lokal seperti Forlika dapat berfungsi sebagai jembatan efektif antara realitas lokal dan agenda global SDGs, namun keberhasilan jangka panjangnya sangat bergantung pada penguatan mekanisme kelembagaan, koordinasi yang baik, dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang telah mendanai pengabdian ini melalui skema Program Pembinaan Kreativitas dan Kewirausahaan Mahasiswa (PPK Ormawa) tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Forlika (Forum Peduli Kelestarian Alam), Pokdarwis Sigending, yang telah memfasilitasi akses lapangan dan memberikan informasi yang bermanfaat, khususnya Ibu Vera Rosita Ekayanti selaku Ketua Forlika, serta Bapak Mahmud Kiai. Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada YKAN (Yayasan Konservasi Alam Nusantara) Berau, seluruh narasumber dan masyarakat lokal Kampung Teluk Sulaiman yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam pelaksanaan penelitian ini, serta Saudara Arman yang telah membantu dokumentasi udara menggunakan drone di Kawasan Sigending.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashley, C., & Roe, D. (2002). Making tourism work for the poor: Strategies and challenges in Southern Africa. *Development Southern Africa*, 19, 61–82.
- Azizah, P., Hilmi, M. I., Fajarwati, L., & Jember, U. N. (2023). DIKLUS: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah Peran Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) dalam pemberdayaan masyarakat pesisir.
- Ferdianto, J. (2024). *Penelitian dengan pendekatan ekowisata destinasi Sigending di Teluk Sulaiman Kecamatan Biduk Biduk Kabupaten Berau Kalimantan Timur*. Berau, Kalimantan Timur.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach*. Pitman Publishing.
- Giampiccoli, A., & Saayman, M. (2018). Community-based tourism development model and community participation. *African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure*, 7, 1–27.
- Hariyadi, B. R., Rokhman, A., Rosyadi, S., Yamin, M., & Runtiko, A. G. (2024). The role of community-based tourism in sustainable tourism village in Indonesia. *Revista de Gestao Social e Ambiental*, 18(7).
- Inter-Agency and Expert Group on SDG Indicators. (2017). *Global indicator framework for the sustainable development goals and targets*. United Nations.
- Jamal, T. B., & Getz, D. (1995). Collaboration theory and community tourism planning. *Annals of Tourism Research*, 22, 186–204.
- Ife, J., & Tesoriero, F. (2008). *Community development: Alternatif pengembangan masyarakat di era globalisasi*. Pustaka Pelajar.
- Keck, M. E., & Sikkink, K. (1998). *Activists beyond borders: Advocacy networks in international politics*. Cornell University Press.
- Mitchell, R. K., Agle, B. R., & Wood, D. J. (1997). Toward a theory of stakeholder identification and salience: Defining the principle of who and what really counts. *The Academy of Management Review*, 22(4), 853–886.

- Müller, S., Markova, J., & Ponnappureddy, S. (2020). Community-based ecotourism development and destination governance in Cambodia. In *Tourism and development in Southeast Asia* (pp. 182–196). Routledge.
- Patel, Z., Satterthwaite, D., Dodman, D., Hallegatte, S., Neumayer, E., Pelling, M., & Waugh, C. (2020). Local responses to global sustainability agendas: Learning from experimenting with the urban sustainable development goal in Cape Town. *Sustainability Science*, 15(5), 1337–1354.
- Pemerintah Kabupaten Berau. (2016). *Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 474 Tahun 2016 tentang Penetapan Kawasan Lindung dan Ekowisata Mangrove Sigending*. Tanjung Redep, Kabupaten Berau.
- Pollnac, R. C., Pomeroy, C. J., E. Drew, T., & T. M. F. G. E. (2010). Marine reserves as linked social-ecological systems. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 107(43).
- Reed, M. G., & Curzon, R. (2015). Stakeholder engagement in environmental management. In A. P. J. & B. A. Morrison-Saunders (Eds.), *Stakeholder engagement for sustainable development* (pp. 185–203). Edward Elgar Publishing.
- Salman, A., Jaafar, M., Mohamad, D., Ebekozién, A., & Rasul, T. (2024). The multi-stakeholder role in Asian sustainable ecotourism: A systematic review. *PSU Research Review*, 8(3), 940–958.
- Scheyvens, R. (2002). *Tourism for development: Empowering communities*. Pearson Education Limited.
- Tampubolon, N., & Wulandari, C. (2021). The importance of community-based ecotourism sustainability and its supports to the SDGs: Goals number 8 and 17, 4.
- Timothy, D. J. (2002). *Tourism and political boundaries*. Routledge.
- Tosun, C. (2000). Limits to community participation in the tourism development process in developing countries. *Tourism Management*, 21, 613–633.
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. United Nations.
- United Nations Development Programme. (2020). *Partnerships for the sustainable development goals: A legacy review towards realizing the 2030 agenda*. United Nations.
- Weaver, D. B. (2006). *Sustainable tourism: Theory and practice*. Elsevier Butterworth-Heinemann.
- Yamin, M., Darmawan, A., & Rosyadi, S. (2021). Analysis of Indonesian tourism potential through the sustainable tourism perspective in the new normal era, 10(1).